

DAFTAR BACAAN

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah, Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/25/PBI/2008 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/19/PBI/2008 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia dalam Rupiah dan Valuta Asing.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/14/PBI/2005 Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valuta Asing oleh Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/16/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/15/PBI/2005 tentang Jumlah Modal Inti Minimum Bank Umum.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 /POJK.03/2018 Tahun 2018 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar Bagi Bank Umum.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit.

Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Prekreditasi Bank Bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia kepada Bank Umum No. 9/12/DPNP tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) bagi Bank Umum.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/26/UPK tanggal 12 Januari 1979 tentang Pembiayaan Secara Konsorsium oleh Bank Pemerintah.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 21/18/BPPP tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) bagi Debitur Perorangan dan Kelompok.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/33/UPK tanggal 3 Oktober 1973 tentang Pembiayaan Bersama oleh Bank-Bank Pemerintah (Konsorsium).

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7/23/DPD Tahun 2005 tentang Pembatasan Transaksi Rupiah dan Pemberian Kredit Valutas Asing Oleh Bank.

Surat Edaran No. 21/11/BPPP tentang pemberian pinjaman kepada pengurus dan pemegang saham.

Buku:

Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Bachsan Mustofa, Bewa, Ragawino, 1985, *Asas-Asas Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Armico, Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Hilmam Hadikusuma, 1992, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

J. Satrio, 1995, *Hukum Perikatan "Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian" Buku 1*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

K.R.T.M. Tirtodiningrat, 1966, *Ihtisar Hukum Perdata dan Hukum Dagang*, Pembangunan, Jakarta.

Mahdi, 1989, *Falsafah Suatu Pengantar*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mulyati, E., & Dwiputri, F. A. (2018). Prinsip Kehati-Hatian Dalam Menganalisis Jaminan Kebendaan Sebagai Pengaman Perjanjian Kredit Perbankan. *Acta*

Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Cetakan Pertama. Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Edisi 15, Kencana, Jakarta.

R. Setiawan, 1979, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung.

R. Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta.

R. Subekti, 1976, *Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional*, Alumni, Bandung.

R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta.

Sjahdeini, 1997

Sudikno Mertokusumo, 1986, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 1997, *Kredit Sindikasi: Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Wiryo Pradjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.

Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Jurnal:

Abubakar, L., & Handayani, T. (2017). "Telaah Yuridis Terhadap Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Aktivitas Perbankan Indonesia". *De Lega Lata*, 2(1), 68–91.

Angraeni, K. D., & Nasution, K. (2019). "Kekuatan Hukum LoU Sebagai Jamanian Dalam Kredit Sindikasi". *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 2(2), 185. <https://doi.org/10.30996/jhbbc.v2i2.2521>

Cita, R. H., Abubakar, L., & Mulyati, M. (2018). Kedudukan Hukum Kreditur Baru Penerima Pengalihan Piutang Tanpa Persetujuan Agen Dan Peserta Sindikasi Lainnya. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(1), 1–14. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n1.3>

Handayani, P. (2016). "Prinsip Kehati-Hatian Bank Dalam Pemberian Kredit Ditinjau Dari Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perbankan". *Jurnal Dimensi*, 4(2), 1–12. <https://doi.org/10.33373/dms.v4i2.39>

Handayani, T., & Abubakar, L. (2018). "Regulasi Pengelolaan Likuiditas Bank melalui Kewajiban Penerapan Net Stable Funding Ratio (NSFR) sebagai Upaya Menciptakan Perbankan yang Sehat". *Varia Justicia*, 14(1), 10–20. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2039>

Haryanto, S. (2018). "Determinan Efisiensi Bank: Analisis Bank Di Indonesia". *AFRE (Accounting and Financial Review)*, 1(1), 46–52. <https://doi.org/26.82017/JKP.2017.001>

Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan Ke-PPAT-An, 1(2), 134. <https://doi.org/10.24198/acta.v1i2.112>

- Muhammad Umar, "Kedudukan dan Tanggung Jawab Hukum Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi Perbankan", *Jurnal Hukum Jatiswara*, Vol 26, Universitas Mataram, 2011, h. 16.
- Murwadji, T. (2013). "Transformasi Jaminan Kebendaan Menjadi Jaminan Tunai Dalam Penjaminan Kredit Sindikasi Internasional". *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 98–118. [https://doi.org/ 10.20885/iustum.vol20.iss1.art6](https://doi.org/10.20885/iustum.vol20.iss1.art6)
- Rahmayati, R. (2019). "Pembiayaan Sindikasi Sebagai Peningkatan Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah". *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 7(1), 1–16. [https://doi.org/ 10.24952/MASHARIF.V7I1.1617](https://doi.org/10.24952/MASHARIF.V7I1.1617)
- Tirana, G., Abubakar, L., & Handayani, T. (2019). "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Piutang Atas Jaminan Hak Guna Bangunan Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi". *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Dan Ke-PPAT-An*, 2(2), 267. [https://doi.org/ 10.24198/acta.v2i2.244](https://doi.org/10.24198/acta.v2i2.244)
- Umardani, K. M. (2016). "Kredit Sindikasi Dalam Perspektif Hukum Dan Peraturan Perbankan (Studi Kasus Pada PT. Bank DKI)". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 7(1), 90–110. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Yose, M., & Trihantana, R. (2017). "Peran Serta Dan Mekanisme Bank Syariah Pada Pembiayaan Sindikasi Di Bank Syariah Mandiri Pusat". *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 3(2), 403. [https://doi.org/ 10.30997/jn.v3i2.814](https://doi.org/10.30997/jn.v3i2.814)

Website dan Lainnya:

- Kusumaningtuti, Barus, F., & Ariyanti, D. (2008). Pinjaman Sindikasi Luar Negeri. In Seri Kebanksentralan. retrieved from www.bi.go.id